

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah suku bunga SBI, inflasi dan permintaan kredit, dimana objek penelitian ini dilakukan di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan data yang di perlukan untuk mengetahui suku bunga, inflasi dan permintaan kredit bersumber dari laporan keuangan yang penulis peroleh dari *website* Bank Indonesia yakni www.bi.go.id, *website* Bank Negara Indonesia yakni www.bni.co.id, dan Otoritas Jasa Keuangan yakni www.ojk.go.id.

3.2 Sejarah Bank Negara Indonesia

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional.

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini

melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha nasional. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai 'BNI 46'. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat - 'Bank BNI' - ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988.

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996.

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank BNI' dipersingkat menjadi 'BNI', sedangkan tahun pendirian - '46' - digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada akhir tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia memegang 60% saham BNI, sementara sisanya 40% dimiliki oleh pemegang saham publik baik individu maupun institusi, domestik dan asing.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak: Bank BNI Syariah, BNI *Multi Finance*, BNI *Securities* dan BNI *Life Insurance*.

Di akhir tahun 2013, jumlah aset yang dimiliki BNI tercatat sebesar Rp386,7 triliun dan jumlah karyawan sebanyak 26.100 orang. Jaringan layanan BNI tersebar di seluruh Indonesia melalui ke-1.693 outlet domestik dan di luar negeri melalui cabang-cabang di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura dan Osaka. Jaringan ATM BNI saat ini tercatat sebanyak 11.163 unit ATM milik sendiri. Layanan BNI juga tersedia melalui 42.000 EDC, *Internet Banking*, dan *SMS Banking*.

3.3 Visi dan Misi Bank Negara Indonesia

Visi BNI

Menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja.

Misi BNI

- Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama (the bank choice)
- Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.
- Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
- Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

3.4 Struktur Organisasi Bank Negara Indonesia

Struktur organisasi BNI secara keseluruhan menunjukkan adanya fungsi keterikatan satu sama lain. Fungsi ini memungkinkan atasan membuat keputusan-keputusan penting yang akan dilaksanakan bawahannya dan memungkinkan pelaksanaan pola pertanggung jawaban antara atasan dan bawahan. Adapun bentuk struktur organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terlampir pada Halaman Lampiran 1.

3.5 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus BNI

Uraian tugas dan tanggung jawab pengurus hanya untuk tingkat dewan komisaris dan direksi. Adapun tugas dan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:

3.5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar BNI, Dewan Komisaris bertugas untuk:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BNI oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi.

3. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan BNI, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan BNI.
4. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BNI disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
5. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
6. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
7. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BNI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
8. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawasan Intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
9. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi

pengawasan, penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank, antara lain untuk melepas atau menjual dan menghapus aktiva tetap milik BNI yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris atau mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerja sama operasi, kontrak manajemen, kerja sama lisensi Bangun Guna Serah (*Built, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Built, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

3.5.2 Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Adapun secara garis besar, pelaksanaan tugas tersebut meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain melalui:
 - 1) Evaluasi kinerja keuangan atau realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) setiap bulan.
 - 2) Evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan ke Bank Indonesia setiap semester.
 - 3) Evaluasi atas pokok-pokok hasil audit dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dilaporkan ke Bank Indonesia setiap semester.
 - 4) Evaluasi atas *internal control* atau Satuan Pengawasan Intern setiap tahun.
 - 5) Evaluasi posisi dan perkembangan risiko BNI setiap tahun.
 - 6) Konsultasi atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu.

- 7) Pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi untuk membahas aspek-aspek tertentu seperti bisnis, organisasi, sumber daya manusia, dan lain-lain.
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, antara lain penyusunan dan evaluasi terhadap *Corporate Plan* dan RBB.

Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawasan Intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya, antara lain dengan meminta Direksi untuk menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawasan Intern dan auditor eksternal (Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau otoritas lainnya), baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam hal ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Dewan Komisaris tidak melakukan pengambilan keputusan terhadap kegiatan operasional, kecuali yang diwajibkan dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris memiliki "Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi" yang bersifat mengikat, yang terus dievaluasi dan di up-date untuk disempurnakan. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dengan penjelasan dalam sub komite-komite pada bagian Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dari Laporan Tahunan ini.

3.5.3 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan serta mengelolanya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BNI serta peraturan perundangundangan yang berlaku. Secara khusus tugas dan wewenang Direksi diatur terperinci dalam Anggaran Dasar sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun kersamasama atau kepada orang atau badan lain;
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membentuk Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*);
6. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
7. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang diluar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/ atau penyelesaian kredit namun dengan

kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;
9. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
10. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
11. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
12. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
13. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
14. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;

15. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
16. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri;
17. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
18. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
19. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
20. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
21. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
22. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;

23. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengelola Perseroan, tindakan Direksi senantiasa dilandasi dengan prinsip-prinsip GCG, etika bisnis serta prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi telah membentuk *Corporate Secretary*, Satuan Pengawasan Intern, Divisi Enterprise Risk Management, Divisi Kepatuhan serta Komite-komite dibawah Direksi.

Tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Pengawasan Intern, Perencanaan Strategis serta Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan.
2. Wakil Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang *Change Management Office*, *Human Capital* dan *Organizational Learning*.
3. Direktur *Business Banking* bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Korporasi, Jasa Keuangan & Dana Institusi, *transactional Banking & Financial Service*, Usaha Menengah, dan Usaha Kecil.
4. Direktur Konsumer & Ritel bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang *Product Management*, *Customer Management & Marketing*, *Consumer & Retail Sales Distribution*, Bisnis Kartu, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan *Process Excellence*.

5. Direktur Kepatuhan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Kepatuhan dan Hukum.
6. Direktur Keuangan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Pengendalian Keuangan, Umum, Pengembangan Perusahaan Anak.
7. Direktur *Enterprise Risk Management* bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang *Enterprise Risk Management* dan *Policy Governance*.
8. *Chief Business Risk Officer* bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang *Remedial & Recovery* dan *Business Risk*.

3.5.4 Kegiatan Usaha

Guna meningkatkan pelayanannya kepada para nasabah, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berusaha terus menerus meningkatkan pelayanan dan menambah produk guna memenuhi semua kebutuhan para nasabahnya. Kegiatan jasa yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terbagi menjadi 2 jenis segmentasi yaitu individu dan bisnis. Jasa-jasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Individu

- 1) Penghimpuna dana, dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut:

(1) Giro Deposito

- (2) Tabungan
 - (3) Tabungan Bisnis
 - (4) Tabungan Pendidikan
- 2) Penyaluran dana, terutama dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat untuk berbagai jenis dan sektor usaha yang terjadi dari:

- (1) KPR - BNI
 - (2) BNI OTO
 - (3) BNI Multiguna
 - (4) BNI Fleksi
 - (5) BNI Instan
 - (6) Kartu Kredit
 - (7) Kredit TKI
 - (8) Kredit Usaha Kecil
- 3) Produk Jasa dan Layanan yang ditawarkan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari:

- (1) Tresuri
 - a. *Foreign Exchange*
 - b. *Fixed Income*
 - c. *Money Market*
 - d. *Bank notes*

- (2) Layanan
 - a. ATM
 - b. *Phone Banking*
 - c. *SMS Banking*

- d. *Internet Banking*
- e. Layanan Prima
- f. Pembayaran
- g. Kiriman Uang Domestik
- h. Kiriman Uang International
- i. OveCek Multi Guna
- j. Cek Perjalanan
- k. Inkaso
- l. ONH
- m. Referensi Bank
- n. *Safe Deposits Box*
- o. Uang Kertas Asing
- p. BNI Layanan Gerak

2. Bisnis

- 1) Penghimpunan dana, dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut:

- (1) DPLK
- (2) Giro

- 2) Penyaluran dana, terutama dalam bentuk pinjaman kepada perusahaan untuk berbagai jenis dan sektor usaha yang terjadi dari:

- (1) Kredit Penerusan
- (2) *Cash Collateral Credit*
- (3) Kartu Kredit
- (4) Kredit Ekspor

- (5) Kredit Impor
- (6) Kredit Investasi
- (7) Kredit Koperasi Primer
- (8) Kredit Modal Kerja
- (9) Kredit Sindikasi

3) Produk Jasa dan Layanan yang ditawarkan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari:

(1) Tresuri

- a. *Foreign Exchange*
- b. *Fixed Income*
- c. *Money Market*
- d. *Bank notes*

(2) Layanan

- a. *Advisory*
- b. Agen Pembayaran
- c. *Arranger Sindikasi*
- d. Inkaso
- e. *Commercial Paper*
- f. Ekspor
- g. *Escrow Agent*
- h. *Facility Agent*
- i. Bank Garansi
- j. Impor
- k. Infonas

l. Investment Services

m. Jasa Kustodi

n. Payment Centre

o. Repo & Reverse Repo

p. Security Agent

q. Settlement Bank

r. Sinking Fund

s. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

(3) Wali Amanat

a. Pembiayaan

b. Pembiayaan Investasi- *Murabahah*

c. Pembiayaan Modal Kerja- *Mudharabah*

d. Pembiayaan Modal Kerja- *Musyarakah*

e. Pembiayaan Investasi- IMBT

f. Bank Guarantee

(3) *Qardhul Hasan Tade Finance*

a. Layanan

b. Transfer/Kiriman Uang

c. Kliring

d. Jual-beli Valas

e. Kiriman Uang dari/ ke Luar Negeri

f. Cek

g. Anjungan Tunai Mandiri

h. Internet Banking

- i. *SMS Banking*
- j. *Phone Banking*
- k. Sistem Pembayaran Gaji
- l. Pengelolaan Keuangan Perusahaan/Institusi
- m. *Virtual Account*
- n. *Cash Pickup*
- o. Sistem Pembayaran SPP
- p. Kiriman Uang
- q. Inkaso
- r. Garansi Bank

3.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan teknik memperoleh, mengumpulkan dan mencatat data yang berupa primer maupun data sekunder yang digunakan untuk menyusun suatu karya ilmiah dan untuk menganalisa faktor yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang pada akhirnya akan didapat kebenaran atas data yang diperoleh.

Hal ini didukung dengan adanya penjelasan menurut Sugiyono (2012:2) yang menjelaskan bahwa: “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis”.

3.6.1 Metode yang Digunakan

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan variabel yang diteliti, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif.

Menurut Sugiyono (2009:206) menjelaskan bahwa pengertian metode deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan menurut Narimawati (2008:61) menyatakan bahwa metode verifikasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan dari data statistik.

Dalam penelitian ini, metode deskriptif verifikatif tersebut digunakan untuk menguji pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap permintaan kredit Bank Negara Indonesia serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau bahkan ditolak.

3.6.2 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012:59) variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1) Variabel Independen (Variabel X)

Variabel independen atau yang juga disebut sebagai variabel bebas, *stimulus*, *predictor*, *antecedent* merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen atau variabel bebas adalah Suku Bunga dan Inflasi, dimana Suku Bunga yang digunakan merupakan Suku Bunga SBI.

2) Variabel Dependen (Variabel Y)

Variabel dependen yang disebut juga variabel terikat, output, kriteria, konsekuensi merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat adalah Permintaan Kredit, dimana Permintaan Kredit tersebut dilihat dari realisasi Pemberian Kredit oleh Bank Negara Indonesia.

Agar lebih jelas mengenai variabel-variabel yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dilihat pada Operasionalisasi Variabel berikut:

Tabel 3.6
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
1	Variabel Bebas (X1) : <i>Suku Bunga</i>	Hasibuan (2011:19) Menjelaskan bahwa bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitur kepada kreditor .	Perkembangan Suku Bunga SBI secara bulanan periode tahun 2008 s.d 2013	Rasio
2	Variabel Bebas (X2) : <i>Inflasi</i>	Susanti, dkk (2007:38) mengungkapkan inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum		Rasio

		secara terus-menerus dan persisten dari suatu perekonomian. Kenaikan dalam harga-harga seluruh barang dan jasa dalam perekonomian harus dibedakan dari kenaikan harga relatif dari barang-barang secara individual.	Perkembangan Inflasi secara bulanan periode tahun 2008-2013	
3	Variabel Terikat (Y) : <i>Permintaan Kredit</i>	Sutarno (2005:92) menyatakan orang yang mendapatkan kredit berarti mendapatkan kepercayaan dari bank untuk mengelolah dan menerima sejumlah uang dengan ketentuan uang yang dipinjamkan tersebut dalam waktu tertentu harus dikembalikan dengan bunganya.	Perkembangan Permintaan Kredit secara bulanan periode tahun 2008-2013	Rasio

3.6.3 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Sampel diambil dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan Sugiyono (2009:39). Adapun ketentuan yang dapat dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

1. Data pada laporan keuangan yang berhubungan dengan tingkat suku bunga selama periode penelitian (tahun 2008 – tahun 2013).
2. Data pada laporan keuangan yang berhubungan dengan tingkat inflasi selama periode penelitian (tahun 2008 – tahun 2013).

3. Data pada laporan keuangan yang berhubungan dengan tingkat permintaan kredit selama periode penelitian (tahun 2008 – tahun 2013).

Oleh karena itu sampel dari penelitian ini adalah secara periode tahun 2008 sampai dengan 2013.

3.6.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif, dimana data dinyatakan dalam angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakili. Adapun sumber data yang dapat menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Data laporan keuangan bulanan PT Bank Negara Indonesia periode 2008-2013
- Sumber-sumber data *online* yang diunduh dari *website* www.bni.co.id, www.bi.go.id dan www.ojk.go.id.
- Data lain yang diperoleh dari literatur-literatur hasil penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian.

3.6.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan cara membaca dan mempelajari teori, ketentuan undang-undang serta pencarian menggunakan internet yang berkaitan dengan kajian penelitian.

2. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen terutama laporan keuangan pada objek penelitian.

3.6.6 Rancangan Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terkait. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, penulis menggunakan statistik parametrik berdasarkan data yang diperoleh. Variabel yang terkait dalam penelitian ini dipengaruhi oleh dua buah variabel bebas, maka penulis menggunakan analisis regresi berganda (*multiple*) untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Untuk perhitungan statistiknya, penulis menggunakan program *SPSS for Windows ver.20*. tahap-tahap pengujian hipotesis dalam analisis regresi berganda meliputi:

1. Pengujian Asumsi Klasik

a) Pengujian Normalitas Data

Sebelum dilakukannya uji statistik dan korelasi, perlu dilakukan pengujian normalitas data dengan menggunakan *Kolmogorov-SmirnovTest* dalam program SPSS. Hal ini dilakukan untuk dapat membuktikan data yang dipergunakan berdistribusi normal. Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya.

Menurut Priyatno (2009:58) kriteria pengambilan keputusan yaitu:

Jika signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

Jika signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal

b) Uji Multikolinearitas

Menurut Priyatno (2009:59) multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna.

Pengambilan Keputusan:

Melihat nilai Tolerance

- ✓ Tidak terjadi Multikolinearitas , jika nilai Tolerance lebih besar 0,10.
- ✓ Terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,10.

Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor)

- ✓ Tidak terjadi Multikolinearitas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00.
- ✓ Terjadi Multikolinearitas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00.

c) Uji Autokorelasi

Menurut Priyatno (2009:61) autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu. Dampak yang diakibatkannya yaitu varian sampel yang tidak dapat menggambarkan varian populasinya. Untuk mengetahui terjadinya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson dengan prosedur sebagai berikut:

- ✓ Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

H_0 : Tidak terjadi autokorelasi

H_a : Terjadi autokorelasi

- ✓ Menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi menggunakan 0,05
- ✓ Menentukan nilai d (Durbin-Watson)
- ✓ Menentukan nilai dL dan dU
- ✓ Pengambilan keputusan:
 - Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
 - Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
 - Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

d) Uji Heterokedastisitas

Menurut Priyatno (2009:60) heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Heterokedastisitas menyebabkan penaksiran atau estimator menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat tinggi. Cara mendeteksinya:

- Secara sederhana dengan melihat diagram pencar, apabila diagram pencarnya mengikuti pola tertentu maka akan bersifat heterokedastisitas, sedangkan bila diagram pencarnya menyebar dengan pola yang tidak jelas atau acak maka cenderung tidak bersifat heterokedastisitas.

- Dengan melakukan pengujian hipotesis yang salah satunya adalah dengan uji kolerasi *Rank Spearman* dan menggunakan metode membuat grafik plot atau scatter.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk meramalkan nilai variabel dependen (Y) berdasarkan nilai variabel independen (X) serta taksiran perubahan variabel dependen (Y) untuk setiap satuan perubahan variabel independen (X). Persamaan analisis regresi linear secara umum untuk dua variabel independen adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Dimana :

Y = Variabel Permintaan Kredit

X_1 dan X_2 = Variabel Suku Bunga dan Inflasi

α = Konstanta, nilai terkait yang dalam hal ini adalah Y pada saat variabel bebasnya adalah 0.

β_1 dan β_2 = Koefisien Regresi Berganda antara variabel bebas X_1 dan X_2 terhadap Y, bila variabel bebas X_1 dan X_2 dianggap konstan.

Koefisien β adalah apabila nilai positif (+) maka menunjukkan hubungan yang searah antara variabel bebas dengan variabel terkait, atau dimaksud juga peningkatan/penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh besarnya peningkatan/penurunan besarnya variabel terkait. Sedangkan jika negatif (-) maka

akan menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara variabel bebas dengan variabel terkait.

Setelah mendapat persamaan regresi maka selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik regresi yang meliputi uji multikolinieritas, uji autokolerasi dan heterokedastisitas.

3. Analisa Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Koefisien Korelasi Berganda adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara 3 variabel/lebih. Koefisien korelasi berganda dirumuskan:

$$R_{y.x_1x_2} = \sqrt{\frac{r^2_{yx_1} + r^2_{yx_2} - 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1x_2}}{1 - r^2_{x_1x_2}}}$$

Dimana:

r_{yx_1} = Koefisien korelasi antara variabel x_1 dengan variabel y

r_{yx_2} = Koefisien korelasi antara variabel x_2 dengan variabel y

Koefisien korelasi menunjukkan berapa besar varian total satu variabel berhubungan dengan varians variabel lain. Hal ini berarti bahwa tiap nilai r perlu ditafsirkan posisinya dalam keterkaitan tersebut. Untuk memberikan tafsiran pada nilai koefisien korelasi, dapat digunakan referensi *guilford empirical rules* pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Penafsiran Koefisien Korelasi

Besar r_{yx}	Penafsiran
0,00 – < 0,20	Hubungan sangat lemah (diabaikan, dianggap tidak ada)
$\geq 0,20$ – < 0,40	Hubungan rendah atau lemah
$\geq 0,40$ – < 0,70	Hubungan sedang atau cukup

$\geq 0,70 - < 0,90$	Hubungan kuat
$\geq 0,90 - \leq 1,00$	Hubungan sangat kuat

Analisis Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Analisis koefisien determinasi diperoleh dengan persamaan berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Nilai Kd pada persamaan di atas menunjukkan seberapa besar nilai variabel bebas x_1 dan x_2 mempengaruhi nilai variabel terikat y . r^2 menunjukkan koefisien korelasi pangkat dua.

4. Koefisien Regresi

a) Uji t

Uji t yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak (Priyatno, 2009:50).

Tahap-tahap pengujian sebagai berikut, Pengujian b_1 (Suku Bunga):

- ✓ Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$$H_0 : b_1 = 0$$

Artinya Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap Permintaan Kredit

$$H_a : b_1 \neq 0$$

Artinya Suku Bunga berpengaruh terhadap Permintaan Kredit.

- ✓ Menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi menggunakan 0,05
- ✓ t hitung dan t kritis
- ✓ Pengambilan keputusan

Jika $t \text{ hitung} \leq t \text{ kritis}$ maka H_0 diterima

Jika $t \text{ hitung} > t \text{ kritis}$ maka H_0 ditolak

Untuk menguji rumusan hipotesis tersebut digunakan uji t dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2012: 184)

b) Uji F

Uji F atau koefisien regresi secara serentak yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak (Priyatno, 2009:48). Tahap-tahap pengujian sebagai berikut:

- ✓ Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$$

Artinya Suku Bunga dan Inflasi secara serentak tidak berpengaruh terhadap Permintaan Kredit.

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$$

Artinya Suku Bunga dan Inflasi secara serentak berpengaruh terhadap Permintaan Kredit.

- ✓ Menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi menggunakan 0,05
- ✓ F hitung dan F kritis
- ✓ Pengambilan keputusan

Jika F hitung \leq F kritis maka H_0 diterima

Jika F hitung $>$ F kritis maka H_0 ditolak

